



RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkatnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Utara dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan Perangkat Daerah lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kami dan semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Utara, dan dapat digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Tanjung Selor, 04 Maret 2022

Kepala Dinas



Norman, SE, M. Si
NIP. 19621210 199303 1 007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	42

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rancanangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rancangan Awal Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 secara substansial menjabarkan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan program Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini kemudian akan dibahas

dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, memuat peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energy;
- b. Undang Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); >> ini khusus dipakai oleh perangkat daerah pengampu SPM;
- j. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- k. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;

- u. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenalan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- v. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- w. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor);
- x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Serta untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Kelistrikan, Energi Baru Terbarukan, Geologi Air Tanah serta Mineral dan Batubara selama periode tahun 2023 yang nantinya akan disusun berdasarkan pedoman dalam RENSTRA Perangkat Daerah 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral hingga tahun 2023.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024.
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tahun 2023.
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta penjelasan umum muatan setiap bab nya.

BAB I PENDAHULUAN

Panduan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidahkaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam 5 Program, 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah tersusun dapat dilaksanakan sesuai rencana, meskipun dalam pengelolaannya dilakukan penyesuaian anggaran yang dikarenakan proses refocusing anggaran terkait penanganan Covid 19 yang sedang melanda Indonesia.

Secara keseluruhan Total Anggaran Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2021 pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara senilai 10.415.075.644,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 10.411.564.995,- dan Belanja Modal Rp 3.510.649,-. Dengan jumlah realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 9.557.979.180,- (91,77%) untuk Belanja Operasi Rp 9.554.468.531,- (91,77%) dan Rp 0,- (0%) untuk Belanja Modal.

Dari beberapa Program dan kegiatan dapat dirincikan terkait pencapaian realisasi target kinerja yaitu:

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.**

Dari Anggaran yang tersedia Rp 8.732.954.644,- realisasi yang tercapai yaitu 90,39% senilai Rp 7.894.095.327,-. Adapun dari 6 kegiatan yang ada dan 13 Sub Kegiatan, seluruh realisasi pada sub kegiatan sesuai pencapaian realisasinya. Adapun realisasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik telah mencapai 100% sesuai dengan target bulan berjalan dengan realisasi keuangan 87,36% menyisahkan Rp769.727.641 (12,64%) sisa anggaran untuk belanja gaji pegawai.

- **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**

Realisasi Fisik dan keuangan pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar 99,49% telah sesuai dengan target yang direncanakan, dan dari hasil kinerja Program Bidang Geologi melebihi dari target yang direncanakan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi Ijin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	16	25	156%

Capaian Kinerja dari Bidang Geologi dapat tercapai dikarenakan beberapa hal yang mendukung tercapainya kinerja tersebut antara lain dari Tim Bidang Geologi yang intens dalam melakukan pengawasan serta sosialisasi langsung kepada para pengusaha pengguna air tanah agar mau mengajukan ijin pemanfaatan terhadap air tanah yang sesuai dengan aturan.

- **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**

Pada awal APBD Murni di TA 2021 terdapat 3 Kegiatan yang ada dalam Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara, dengan anggaran sebesar Rp 744.777.412,- tetapi dalam pelaksanaannya mengalami refocusing serta perubahan di APBD-P karena sampai dengan September 2021, Bidang Minerba belum mendapatkan pembagian kewenangan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Povinsi, sehingga menjadi kendala bagi Bidang Minerba dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Pemprov, sehingga pada APBD-Perubahan anggarannya diturunkan menjadi Rp 82.340.000,-. Keseluruhan kegiatan tercapai targetnya yaitu 96,84%, tim minerba memfokuskan dalam pengurusan Administrasi Pengalihan Kewenangan Dari Daerah Ke Pusat, serta pengawasan lapangan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah IUP Taat Aturan	23	19	82,61%

Capaian Kinerja pada Bidang Mineral dan Batubara tidak sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya:

- a. Belum adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini keseluruhan kewenangan daerah belum ada, sehingga tim belum dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, pembinaan serta pemberian rekomendasi teknis terkait bidang minerba.
- b. Saat ini Tim Minerba hanya bisa memperoleh data terkait IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Inspektur Teknik Pertambangan selaku perwakilan pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Tim IT saat ini masih berfokus pada pengawasan Mineral dan Batubara dan belum fokus pada Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga data yang terkumpul belum maksimal.

- **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**

Realisasi fisik yang tercapai atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar 97,68% dan realisasi anggaran senilai Rp 401.595.408,- Dari 4 Sub Kegiatan di bidang Energi Baru Terbarukan. Capaian Target Kinerja yang dicapai sebesar hanya 17,26% yaitu 32,5228375 TOE/Milyar Rupiah kurang yaitu target capaian tahun 2021 sebesar 188,382735 TOE/Milyar Rupiah. Hal ini dikarenakan Pembangkit EBT yang dihitung berdasarkan Pembangkit yang masih aktif dan berfungsi dengan baik setelah dilakukan pengecekan ke lokasi oleh tim EBT untuk pendataan serta koordinasi menyeluruh dengan pihak terkait, ditemukan bahwa beberapa Pembangkit PLTS dan PLTMH sudah tidak dapat berfungsi, sehingga berpengaruh pada pencapaian target Kapasitas Pembangkit EBT.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	188,382735	32,5228375	17,26%

- **Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Realisasi fisik yang tercapai atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar 99,49% dengan besaran realisasi anggaran yaitu Rp 798.089.829,-. Adapun Capaian Kinerja Bidang Ketenagalistrikan sebesar 104,32% yaitu 174.527KK melebihi target yang telah direncanakan sebesar 167.300KK. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Bidang Ketenagalistrikan adalah Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Dinas ESDM dengan PT.PLN selaku pelaksana stakeholder terkait kelistrikan, serta dengan bantuan dari realisasi program Roadmap PLN untuk perluasan jaringan listrik, penambahan pelanggan Baru PLN dan bantuan listrik gratis dari pemerintah Provinsi Kaltara sebesar 150 titik bantuan.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
TAHUN 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/subkegiatan(Output)	Target Capaian Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			6	7		8	9	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.29 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	Dokumen					-	-	
3.29 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	Dokumen RENSTRA				-	-	-	
3.29 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan unit kerja yang memperoleh layanan administrasi	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan unit kerja yang memperoleh layanan administrasi	2	Dokumen					-	-	
3.29 . 01 . 1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen terkait Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	2	Dokumen BMD					-	-	
3.29 . 01 . 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ASN/Tenaga non ASN yang memperoleh layanan peningkatan disiplin dan kapasitas	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	70	Sarana					-	-	
3.29.1.01 . 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	300	Pakaian Dinas					-	-	
3.29 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	330	Pegawai				6	6	2	
3.29 . 01 . 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan unit kerja yang memperoleh layanan administrasi	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	240	Eksemplar				24	24	10	
3.29.1.01 . 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan				12	12	20	
3.29.1.01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	22	Unit					-	-	
3.29.1.01 . 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	22	Unit				-	-	-	
3.29.1.01 . 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	Paket				-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/subkegiatan(Output)	Target Capaian Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.29 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan unit kerja yang menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan surat yang dikirim dan materai yang tersedia	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	60	Bulan				12	12	20	
3.29 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum yang dilakukan	60	Bulan					-	-	
3.29 . 01 . 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan unit kerja yang menunjang pemeliharaan Barang Milik Daerah	144	unit				22	22	15	
3.29 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	114	unit				22	22	19	
3.29 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	100%	persen				100	100	10.000	
3.29 . 02 . 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Data Dokumen terkait Zona Konservasi Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	4	Dok				1	1	25	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah	Peta Zona Konservasi Air Tanah	4	Peta				1	1	25	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pergub Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1	Pergub					-	-	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Pemutakhiran Peta Zona Konservasi Air Tanah 1:50.000 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	100%	Persen				100%	1	100	
3.29 . 02 . 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Yang Berizin	100%	persen				100	100	10.000	
3.29 . 02 . 1.02 . 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pengusahaan dan Pemanfaatan Air Tanah	66	Pertek				30	30	45	
3.29 . 02 . 1.02 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Air Tanah	5	Laporan Kegiatan				1	1	20	
3.29 . 02 . 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Regulasi Nilai Perolehan Air Tanah	100%	persen				100	100	10.000	
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Data Informasi NPA	1	Laporan					-	-	
3.29.02.1.03.02	Perhitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Pergub	1	Pergub					-	-	
3.29 . 02 . 1.03 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan terkait Regulasi Nilai Perolehan Air Tanah	5	Laporan				1	1	20	

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output/subkegiatan)(Output)	Target Capaian Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.29 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah IUP Taat aturan	28	IUP					23	23	82
3.29 . 03 . 1.03	Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Percentase Tercapainya Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah	85	Persen					50	50	59
3.29 . 03 . 1.03 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	2	Usulan						-	-
3.29 . 03 . 1.03 . 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	75	Rekomtek					10,00	10	13
3.29 . 03 . 1.03 . 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10	Laporan					1,00	1	10
	Penatusahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan	60	Pelaku usaha					-	-	-
3.29.03.1.06.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	60	Rekomentek					-	-	-
3.29.03.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	persen					-	-	-
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah SK pembaharuan terkait patokan harga untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	20	SK					-	0,000	-
3.29.03.1.07.02	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.07.02] Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	harga patokan mineral bukan logam dan batuan	20	SK					2,00	2	10

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/subkegiatan(Output)	Target Capaian Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Percentase Pengelolaan EBT yang terdata	201,226397	OE/Milyar Rupiah				31	31	15
3.29 . 05 . 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi	6,93	Persen					-	-
3.29 . 05 . 1.04 . 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	31	Dokumen				1	1	3
3.29 . 05 . 1.04 . 03	Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	6	Kegiatan				2	2	33
3.29 . 05 . 1.04 . 04	Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Laporan	35	Laporan				5	5	14
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta BIMTEK	75	Peserta					-	-
3.29 . 05 . 1.04 . 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	5	Laporan				1	1	20
3.29 . 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	208223	KK				174.554	174.554	84
3.29 . 06 . 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi	100%	Persen					-	-
3.29 . 06 . 1.02 . 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Binwas PPM dan Infrastruktur Penunjangnya	1	Laporan				-	-	-
3.29 . 06 . 1.02 . 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pertimbangan Teknis	210	75 Pertek dan 100 SKT				35	35	17
3.29 . 06 . 1.02 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan	5	Laporan				1	1	20
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		100%						-	-
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	75	Kegiatan				15	15	20
3.29 . 06 . 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	100%	Persen					-	-
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Database Penerima Manfaat	5	Database				1	1	20
3.29 . 06 . 1.06 . 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik yang dilaksanakan	225	Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi				45	45	20
3.29 . 06 . 1.06 . 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang terbangun	31.736	Laporan terkait 31.736 Bantuan Pasang Baru Listrik				50	50	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

No	Indikator	Target PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan	52,57%	53,33%	55,55%	57,78%	43,18%	50,00%	52,27%	54,55%	Penyesuaian Target dikarenakan kewenangan provinsi terkait Minerba hanya terbatas pada Mineral bukan logam dan batuan
2	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit	0,006%	3,93%	4,68%	5,43%	0,00013%	2,40%	2,90%	3,30%	
3	Rasio Elektrifikasi	80,32%	85,16%	90,08%	95,08%	80,71%	82,10%	84,55%	87,35%	
4	Rasio Desa Yang Teraliri Listrik	69,98%	75,73%	79,05%	86,72%	71,16%	73,75%	75,89%	80,65%	Realisasi tahun 2021 Peningkatan melebihi target dikarenakan penambahan pengguna listrik pelanggan PLN yang signifikan.
5	Cakupan rumah tangga teraliri listrik	163.700KK	177.382 KK	187.639KK	198.045KK	174.527KK	177.382KK	187.639KK	198.045KK	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pelayanan bersinergi dengan program yang telah direncanakan dengan Perangkat Daerah baik kabupaten/kota maupun dengan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sering kali masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang juga berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional pemerintah pusat

Beberapa tantangan, hambatan dan peluang yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diantaranya:

a. Bidang Sekretariat:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2. Masih perlu ditingkatkan lagi kualitas kompetensi dan kapasitas dari SDM yang ada saat ini guna memaksimalkan kinerja Dinas, serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan dinas

b. Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara

- a. Sentralisasi Pelimpahan wewenang Pemerintah Daerah terkait Pengawasan Kewenangan Perijinan Pertambangan Batubara yang ditarik keseluruhannya ke Pemerintah Pusat berdasarkan amanat UU No 3 Tahun 2020 dan sampai saat ini belum ada pembagian kewenangan yang diturunkan melalui Perpres oleh Pemerintah Pusat.
- b. Kesadaran untuk pertambangan-pertambangan tanpa izin untuk mengurus perizinan
- c. Belum terwujudnya pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian secara optimal
- d. Dibatasinya kouta produksi batubara oleh pemerintah pusat
- e. Perubahan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi belum maksimal
- f. Laporan pelaksanaan rencana reklamasi maupun pascatambang yang wajib disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan setiap tahun belum maksimal

1. Peluang dan upaya yang dilakukan/dicapai

- a. Dalam pelaksanaan kewenangan ini keterbatasan aparat pemerintah daerah menyebabkan terjadi praktek pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pertambangan. Untuk mengurangi dampak kerusakan maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha

pertambangan yang dilakukan secara administratif dan teknis operasional.

- b. Adapun yang menjadi parameter penentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang patuh terhadap peraturan adalah kepatuhan secara administrasi dan finansial, kepatuhan dalam laporan, kepatuhan dalam pelaksanaan reklamasi dan kepatuhan dalam melaksanakan reklamasi.
- c. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan bahan galian harus dioptimalkan karena sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil serta perlindungan dari bencana ekologis.
- d. Menyurati pemerintah pusat untuk permohonan permintaan tambahan kouta produksi batubara.

c. Isu Strategis Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak diperbatasan negara memiliki kondisi pelayanan penyediaan energy listrik yang belum merata. Secara umum, kondisi ini disebabkan oleh wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang relatif luas dengan pola penyebaran penduduk yang tersebar. Hal lain yang menjadi tantangan dalam penyediaan energi listrik di Provinsi Kalimantan Utara yaitu ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi dan pemanfaatan energy baru terbarukan yang masih rendah dibandingkan dengan ketersediaan potensi energi baru terbarukan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur dalam rangka menyediakan energi listrik yang andal dan dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat, khususnya dengan memanfaatkan potensi energy baru terbarukan yang ada.

Kendala yang dihadapi

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Penyebaran pemukiman penduduk yang menyebar dengan jarak yang jauh satu dengan yang lain, sehingga membutuhkan pembangunan jaringan listrik yang sangat panjang.
- b. Akses jalan ke desa desa khususnya daerah perbatasan yang masih sulit, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain:

- a. Alokasi anggaran dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi, baik anggaran untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan, anggaran pemasangan instalasi listrik rumah dan anggaran untuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, khususnya di daerah yang belum menikmati layanan listrik.
- b. Mendorong PT. PLN (Persero) untuk membuka unit layanan baru di daerah yang masih sulit dijangkau dengan perluasan jaringan listrik, baik dengan pembangunan pembangkit listrik non energi terbarukan, maupun pembangunan pembangkit energi baru terbarukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Mendorong PT. PLN (Persero) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang masuk dalam Proyek Strategi Nasional.

d. Isu Strategis Bidang Geologi Dan Air Tanah

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang geologi dan air tanah yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan dana;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan izin pengusahaan air tanah dan mekanisme penerbitannya;
- c. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Geologi;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- e. Kegiatan sosialisasi belum melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai tugas di bidang penegakan hukum sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman pelaku usaha dari segi peraturan terkait pengusahaan air tanah serta sanksi atau akibat jika tidak mematuhi;

Adapun berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kegiatan di bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Lebih pro aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pengelola atau pengusaha air tanah dengan cara sosialisasi door to door;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Geologi dan Air Tanah;
- c. Kegiatan koordinasi bidang Geologi dan Air Tanah hendaknya bisa lebih difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang bersumber dari air tanah serta pembinaan dan pengawasannya;

- d. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah perlu diadakan secara berkelanjutan terutama di daerah yang memiliki banyak pelaku usaha air tanah yang belum memiliki izin SIPA;
- e. Materi Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah hendaknya diperluas dengan bahasan mengenai konservasi air tanah terutama mencakup perlindungan dan pelestarian air tanah;
- f. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara hendaknya lebih pro aktif untuk membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengajuan izin SIPA terutama bagi pemohon yang bertempat tinggal jauh dari ibukota provinsi, bisa dibantu dengan mendorong masyarakat untuk mengajukan izin secara kolektif;
- g. Perlu dilakukan penjemputan permohonan perizinan SIPA secara kolektif bagi daerah yang jauh dari Kota Tanjung Selor seperti Kecamatan Sebatik, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung;
- h. Untuk kegiatan pengadaan air baku/air bersih dilimpahkan ke Dinas PUPR sesuai dengan kewenangannya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100	15.039.620.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100	15.202.120.000	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.530.020.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.530.020.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KALTARA	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	7.950.600.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KALTARA	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	7.950.600.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KALTARA	jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	579.420.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KALTARA	jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	579.420.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	57.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	57.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KALTARA	Jumlah Dokumen terkait Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	1	57.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KALTARA	Jumlah Dokumen terkait Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	1	57.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	800.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	862.500.000	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				62.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	LUAR KALTARA	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80	800.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	LUAR KALTARA	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80	800.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.906.860.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.906.860.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALTARA	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	639.660.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALTARA	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	639.660.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KALTARA	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	256.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KALTARA	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	256.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KALTARA	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	113.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KALTARA	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	113.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KALTARA	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48	9.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KALTARA	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48	9.600.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	KALTARA	Jumlah Bulan fasilitas Kunjungan Tamu	12	65.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KALTARA	Jumlah Bulan fasilitas Kunjungan Tamu	12	65.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALTARA	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.822.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALTARA	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.822.600.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KALTARA	Jumlah Unit BMD yang diadakan	6 unit	190.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KALTARA	Jumlah Unit BMD yang diadakan	6 unit	190.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALTARA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	R2 :6	190.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALTARA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	R2 :6	190.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.169.140.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.169.140.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KALTARA	Jumlah bulan surat yang dikirim	12	16.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KALTARA	Jumlah bulan surat yang dikirim	12	16.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KALTARA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	205.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KALTARA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	205.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALTARA	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12	19.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALTARA	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12	19.800.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KALTARA	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum yang dilakukan	12	928.340.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KALTARA	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum yang dilakukan	12	928.340.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	28 Unit	386.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	28 Unit	386.600.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALTARA	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28 Unit	386.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALTARA	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28 Unit	386.600.000	
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	KALTARA	Persentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	51,52%	Rp 624.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	KALTARA	Persentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	51,52%	Rp 1.100.000.000	
							Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan		Rp 350.000.000	
						KALTARA	Terbitnya Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Tanah	22,72%	Rp 150.000.000	
						KALTARA	Terkendalinya Pemanfaatan Air Tanah	60,60%	Rp 200.000.000	
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara		Pergub terkait Zona Konservasi Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	100%	Rp 300.000.000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara		Persentase Pemutakhiran Peta Zona Konservasi Air Tanah 1:50.000 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara		Rp 300.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	KALTARA	Persentase Pemutakhiran Peta Zona Konservasi Air Tanah 1:50.000 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	30%	Rp 300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	KALTARA	Persentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah	60,6%	Rp 300.000.000	
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah	83%	Rp 324.000.000	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah		Rp 450.000.000	
						KALTARA	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah Provinsi	1 Laporan	Rp 150.000.000	
						KALTARA	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	KALTARA	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan	54	Rp 324.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	KALTARA	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan	60,60%	Rp 200.000.000	

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Jumlah IUP Taat aturan	25	Rp 1.095.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Jumlah IUP Taat aturan	25	Rp 6.170.000.000	
KEGIATAN : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	55%	Rp 520.000.000	KEGIATAN : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	55%	Rp 545.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	KALTARA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	Rp 25.000.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	KALTARA	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut yang tersusun	20	Rp 120.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	KALTARA	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut yang tersusun	20	Rp 120.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	KALTARA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	55,0%	Rp 400.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	KALTARA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	55,0%	Rp 400.000.000	
KEGIATAN : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan	12	Rp 372.000.000	KEGIATAN : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan	12	372.000.000	
Peysusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12	Rp 72.000.000	Peysusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12	72.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	KALTARA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,55	Rp 300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	KALTARA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,55	300.000.000	

Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Jumlah SK pembaharuan terkait patokan harga untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	4	Rp 203.000.000	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Jumlah SK pembaharuan terkait patokan harga untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	4 Dokumen	Rp 203.000.000	
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	KALTARA	Terkumpulnya dan terolahnya data Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	4 Dokumen	Rp 100.000.000	
Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	KALTARA	harga patokan mineral bukan logam dan batuan	4	Rp 203.000.000	Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	KALTARA	Terlaksananya penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	4 Dokumen	Rp 53.000.000	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	KALTARA	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	4 Laporan	Rp 50.000.000	
					Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah pertambangan rakyat		Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah pertambangan rakyat		Rp 5.050.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh Pemerintah Pusat	KALTARA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan rakyat dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	Rp 25.000.000	
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	KALTARA	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	1 Dokumen	Rp 5.000.000.000	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	KALTARA	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	55%	Rp 25.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	32,290885	Rp 36.491.428.571	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	32,290885	Rp 36.991.428.571	
Palaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit	4,68	Rp 36.491.428.571	Palaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				36.491.428.571	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	KALTARA	Jumlah FS dan DED	2	Rp 350.000.000	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	KALTARA	Jumlah FS dan DED	2	Rp 350.000.000	
Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	KALTARA	Jumlah Kabupaten/Kota	5	Rp 500.000.000	Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	KALTARA	Jumlah Kabupaten/Kota	5	Rp 500.000.000	
Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	KALTARA	Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan EBT	7	Rp 34.991.428.571	Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	KALTARA	Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan EBT	7	Rp 34.991.428.571	
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	KALTARA	Jumlah peserta BIMTEK	15	Rp 150.000.000	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	KALTARA	Jumlah peserta BIMTEK	15	Rp 150.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	KALTARA	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan diawasi terkait Konservasi Energi	4	Rp 500.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	KALTARA	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan diawasi terkait Konservasi Energi	4	Rp 500.000.000	
					Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	KALTARA	Jumlah potensi dan pemanfaatan biofuel sebagai bahan bakar dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	Rp 500.000.000	
					Pembinaan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	KALTARA	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	6	Rp 250.000.000	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	KALTARA	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	6	Rp 250.000.000	

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		1.) Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	1,187.639 KK	Rp 40.711.200.000	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	187.639 KK	2.300.000.000	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			100%	Rp 550.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			100%	700.000.000	
					Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah Prosedur dan Persyaratan IO dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang tersusun	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang tersusun	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah SKTT Perizinan Operasi	15 SKTT	Rp 300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	KALTARA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	300.000.000	
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri			100%	Rp 150.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri			100%	150.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal	KALTARA	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	20 Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal	KALTARA	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1 laporan	150.000.000	
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	88,30%	Rp 40.011.200.000	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	88,30%	1.450.000.000	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	KALTARA	Jumlah Database Penerima Manfaat	1 Database	Rp 500.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	KALTARA	Jumlah Database Penerima Manfaat	1 Database	250.000.000,00	
					Pengumpulan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	KALTARA	Jumlah Database jaringan ketenagalistrikan	1 Database	250.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	KALTARA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	KALTARA	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1 laporan	300.000.000,00	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	KALTARA	Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang terbangun	14.004 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 39.211.200.000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	KALTARA	Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang terbangun	200 bantuan pasang baru	650.000.000,00	
TOTAL				93.961.248.571	TOTAL				61.763.548.571	

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil koordinasi dengan pemangku kepentingan, terangkum beberapa masukan untuk program/kegiatan yang telah ditujukan kepada Kepala Daerah dan kajian dari musresbang kab/kota yang telah dilaksanakan beberapa saat lalu.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota

Berikut penjelasan program/kegiatan terkait usulan yang sudah dirangkum.

Tabal 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Kalimantan Utara	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi	5 Kegiatan	1. Pembangunan PLTS Terpusat di Desa Sukamaju Kab. Nunukan
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi				2. Bantuan PJUTS untuk TPA Tg Harapan, Kel Tanjung Harapan (Kab.Nunukan), Bantuan PJUTS di Desa Long Peso, Desa Sekatak, Desa Salimbatu, Desa Mara (Kab. Bulungan)
	Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi				3. Pembangunan PLTMH di Desa Long Aran Kab. Malinau
Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	4. Inventarisasi terkait Kondisi Seluruh PLTMH dan PLTS yang ada di Kaltara				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	Bimbingan Tekhnis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi				5. Pembuatan FE dan DED untuk pembangunan PLTS dan PLTMH di Wilayah Kalimantan Utara
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi				
2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kalimantan Utara	Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	5 Kegiatan	1. Untuk Pembangunan Jaringan Listrik Untuk RS. Pratama di Kecamatan Krayan Barata Kabupaten Nunukan dan Pembangunan Jaringan Listrik di Kantor Kecamatan Sebatik Timur akan diusulkan ke PT. PLN (Persero).
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2. Untuk Perluasan jaringan listrik ke Seputuk - Belayan Ari, Bebatu - Bandan Bikis, Kabupaten Tana Tidung
	Pengumpulan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan				3. Pemberian bantuan pasang baru listrik sejumlah 200 rumah untuk masyarakat tidak mampu yang tersebar di 5 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara melalui Bantuan Daerah dan 1500 Pasang Baru listrik melalui bantuan Kementerian ESDM
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				4. Untuk pembangunan jaringan listrik di Desa Tengku Dacing, masih terhambat oleh akses jalan yang rusak.
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				5. Perluasan jangkauan Jaringan Listrik sampai keseluruhan pedesaan se Kalimantan yang bisa dilewati oleh Jaringan PLN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tahun 2023 Dinas Energi Dan Sumber Daya masuk dalam program prioritas nasional melalui Pengembangan Infrastruktur EBT pada major proyek Akselarasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Terlampir Data Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Dukungan OPD		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi Pangalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

3.1.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi Telaahan terhadap prioritas provinsi

1. Sepuluh prioritas daerah tahun 2023 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung tercapainya Prioritas Daerah terus berupaya agar dapat mensinkronisasikan Program kerja Dinas agar tujuan dan sasaran daerah serta prioritas daerah dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.
2. Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perangkat Daerah pemangku Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral bukan sebagai pemangku Urusan Wajib tetapi sebagai salah satu pemangku urusan pilhan bidang energy, sehingga tidak memiliki data dukung SPM.

Tabel 3.2 Hasil penelaahan terhadap prioritas daerah

No	Prioritas Daerah	Dukungan OPD			Lokasi Kegiatan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Sungai Mentarang Kab. Malinau dan Sungai Kayan Kab. Bulungan
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	
				Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	
				Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	
				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	

No	Prioritas Daerah	Dukungan OPD			Lokasi Kegiatan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
	Mewujudkan pembangunan KIPI	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi Pegalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tanah Kuning Kab. Bulungan
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Keempatannya Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

No	Prioritas Daerah	Dukungan OPD			Lokasi Kegiatan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	
				Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian,	

No	Prioritas Daerah	Dukungan OPD			Lokasi Kegiatan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	dan Izin Pengusahaan Air Tanah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	
	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Seluruh Kabupaten Se- Kaltara
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	

No	Prioritas Daerah	Dukungan OPD			Lokasi Kegiatan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Renja merupakan pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah secara rinci. Sesuai dengan pasal 273 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab.II, bagian ketujuh, paragraph 1 s.d paragraph 7, pasal 125 s.d pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja). Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Penyusunan Renja Tahun 2023 bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode 2022-2026.
2. Terlaksananya Program yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah.
3. Membantu dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah, berisikan program, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Secara keseluruhan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Program/Kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) program, dimana terdiri dari 1 (satu) program pendukung untuk administrasi dan umum serta 4 (empat) program lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersifat teknis:

Program yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
4. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Dengan Renstra)	Keluaran Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM				
						Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Target	Satuan					Target	Satuan	Target	Satuan
						Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan												
3.29.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi										15.202.120.000		100	Persen	14.998.514.000							
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	Dokumen					100.000.000											
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	Dokumen	1	Dokumen	100.000.000	APBD										
3.29.1.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	Bulan					8.530.020.000		12	Bulan	8.685.831.000							
3.29.1.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	Bulan	42	Pegawai ASN	7.950.600.000	APBD	12	Bulan	8.077.440.000							
3.29.1.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	Bulan	1	Dokumen	579.420.000	APBD	12	Bulan	608.391.000							
3.29.1.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	Laporan					57.000.000											
3.29.1.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen terkait Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1	Dokumen	1	Dokumen	57.000.000	APBD										
3.29.1.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12	Bulan					862.500.000		12	Bulan	500.000.000							
3.29.1.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut			Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			80	Pakaian	150	Pakaian Dinas Lapangan	62.500.000	APBD										
3.29.1.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			42	Pegawai ASN	42	Pegawai ASN	800.000.000	APBD	50	Pegawai ASN	500.000.000							
3.29.1.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	Bulan					3.906.860.000		12	Bulan	4.012.843.000							
3.29.1.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	Bulan	4	Paket	639.660.000	APBD	12	Bulan	555.743.000							
3.29.1.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12	Bulan	4	Paket	256.500.000	APBD	12	Bulan	260.000.000							
3.29.1.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12	Bulan	4	Paket	113.500.000	APBD	12	Bulan	114.500.000							
3.29.1.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			48	Eksemplar	24	Koran	9.600.000	APBD	48	Eksemplar	9.600.000							
3.29.1.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Bulan fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12	Bulan	1	Laporan	65.000.000	APBD	12	Bulan	65.000.000							
3.29.1.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	Bulan	1	Laporan	2.822.600.000	APBD	12	Bulan	3.008.000.000							

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Dengan Renstra)	Keluaran Sub Kegiatan (Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM		
						Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Target	Satuan					Target	Satuan
						Target	Satuan	Target	Satuan										
3.29.1.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit BMD yang diadakan			6	Unit					190.000.000		2	Unit	54.000.000			
3.29.1.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			R2-6	Motor	R2-6	Motor	190.000.000	APBD	R2-2	Unit	54.000.000			
3.29.1.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	Bulan					1.169.140.000		12	Bulan	1.314.240.000			
3.29.1.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah bulan surat yang dikirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	Bulan	1	Laporan	16.000.000	APBD	12	Bulan	16.000.000			
3.29.1.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	Bulan	1	Laporan	205.000.000	APBD	12	Bulan	273.000.000			
3.29.1.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor			Jumlah bulan perawatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			12	Bulan	1	Laporan	19.800.000	APBD	12	Bulan	23.750.000			
3.29.1.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum yang dilakukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	Bulan	1	1 Laporan	928.340.000	APBD	12	Bulan	1.001.490.000			
3.29.1.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya			28	Unit					386.600.000		34	Unit	431.600.000			
3.29.1.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28	Unit	28	Kendaraan	386.600.000	APBD	34	Unit	431.600.000			
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan										Rp 1.100.000.000		68,18%	Persen	Rp 630.000.000			
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara		Pergub terkait Zona Konservasi Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara			100%	Persen					Rp 300.000.000		100%	Persen	Rp 300.000.000			
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Persentase Pemutakhiran Peta Zona Konservasi Air Tanah 1:50.000 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			30%	Persen	1	Laporan	Rp 300.000.000	APBD	60%	Persen	Rp 300.000.000			2
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Pengalihan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan			53,03%	Persen					Rp 350.000.000							
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Pengalihan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			Terbitnya Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Tanah				22,72%	Persen			Rp 150.000.000	APBD						2
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Pengalihan, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			Terkendalinya Pemanfaatan Air Tanah				60,60%	Persen			Rp 200.000.000	APBD						2
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi		Percentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah			83%	Persen					Rp 450.000.000		55%	Persen	Rp 330.000.000			
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengelohan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul			1	Laporan	1	Dokumen	Rp 150.000.000	APBD						2
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			1	Dokumen	1	Laporan	Rp 100.000.000	APBD						2
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			1	Laporan	1	Laporan	Rp 200.000.000	APBD	55		Rp 330.000.000			2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Senai Dengan Restra)	Keluaran Sub Kegiatan (Berdasarkan Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM
						Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan			Target	Satuan				
						26	IUP												
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah IUP Taat aturan									Rp 6.170.000.000		Target	Satuan	Rp 1.497.000.000				
3.29.03.1.03	KEGIATAN : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut			55%	Persen					Rp 545.000.000		65%	Persen	Rp 922.000.000			
3.29.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat			1	Laporan	1	Laporan	Rp 25.000.000	APBD					2	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut			20	Dokumen	1	Dokumen	Rp 120.000.000	APBD	25	IUP	Rp 150.000.000		2	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			55,0%	Persen	1	Laporan	Rp 400.000.000	APBD	65%	Persen	Rp 400.000.000		2	
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah pertambangan rakyat		Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah pertambangan rakyat									Rp 5.050.000.000							
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh Pemerintah Pusat			Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan rakyat dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat			1	Laporan	1	Laporan	Rp 25.000.000	APBD					2	
3.29.03.1.04.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat			Dokumen Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 5.000.000.000	APBD					2	
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat			Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			55%	Persen	1	Laporan	Rp 25.000.000	APBD					2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan							
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Dengan Renstra)	Keluaran Sub Kegiatan (Berdasarkan Kependagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM				
						Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Target	Satuan					Target	Satuan	Target	Satuan
						Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan												
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan			12	IUP Batuan						372.000.000		12	IUP	Rp 372.000.000						
3.29.03.1.06.02	Peyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatannya Usahanya dalam 1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			12	Dokumen	1	Dokumen		72.000.000	APBD	12	IUP Batuan	Rp 72.000.000			2			
3.29.03.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			55,0%	Persen	1	Dokumen		300.000.000	APBD	65%	Persen	Rp 300.000.000			2			
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Jumlah SK pembaharuan terkait patokan harga untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan			4	SK						Rp 203.000.000		4		Rp 203.000.000						
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Laporan Data Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah			4	Dokumen	1	Dokumen		Rp 100.000.000	APBD						2			
3.29.03.1.07.02	Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan			Laporan Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan			4	Dokumen	1	Dokumen		Rp 53.000.000	APBD	4	Dokumen	Rp 203.000.000			2			
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam			4	Laporan	1	Laporan		Rp 50.000.000	APBD						2			
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)											Rp 36.991.428.571		213,6547	TOE/Milyar Rupiah	Rp 11.580.000.000						
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun		Jumlah potensi dan pemanfaatan biofuel sebagai bahan bakar dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun			1	Dokumen Potensi						Rp 500.000.000										
3.29.05.1.03.03	Pembinaan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			6	Dokumen	1	Laporan		Rp 250.000.000	APBD									
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			6	Dokumen	1	Laporan		Rp 250.000.000	APBD									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Dengan Renstra)	Keluaran Sub Kegiatan (Berdasarkan Kependagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM					
						Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Target	Satuan					Target	Satuan			
						Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan													
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit			4,68	Persen					Rp 36.491.428.571		5,43	Persen	Rp 11.580.000.000								
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi			Jumlah FS dan DED				2	Dokumen FS/DED	15	Dokumen	Rp 350.000.000	APBD	14	Dokumen FS/DED	Rp 1.800.000.000	1	1,2,5						
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi			Jumlah Kabupaten/Kota				5	Kab/Kota			Rp 500.000.000	APBD	5	Kab/Kota	Rp 500.000.000	1	1,2,5						
3.29.05.1.04.04	Penglokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi			Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan EBT				7	Paket Kegiatan			Rp 34.991.428.571	APBN	7	Paket Kegiatan	Rp 8.630.000.000	1	1,2,5						
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			Jumlah peserta BIMTEK				15	Peserta Bimtek			Rp 150.000.000	APBD	15	Peserta Bimtek	Rp 150.000.000	1	1,2,5						
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			Jumlah Kab/Kota yang dibina dan diawasi terkait Konservasi Energi				4	Kab/Kota			Rp 500.000.000	APBD	4	Kab/Kota	Rp 500.000.000	1	1,2,5						
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik										Rp 2.300.000.000		1.198,045 KK	Kepala Keluarga	Rp 1.100.000.000								
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Persentase Penatausahaan Izin Operasi yang terlaksana			100%	Persen					Rp 700.000.000		100%	Persen	Rp 550.000.000								
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			Jumlah Prosedur dan Persyaratan IO dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan			1%	Dokumen	15	Dokumen Perlek	Rp 150.000.000	APBD					1,2						
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			Jumlah Rekomendasi Perizinan yang tersusun				15	Perlek			Rp 250.000.000	APBD	15	Perlek	Rp 250.000.000		1,2						
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			Jumlah SKTT Perizinan Operasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			15	SKT	1	Laporan	Rp 300.000.000	APBD	15SKT	Laporan	Rp 300.000.000		1,2						
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		Persentase Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terlaksana			100%	Persen					Rp 150.000.000		100%	Persen	Rp 150.000.000								
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal			Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			20	Kegiatan Pengawasan	1	Laporan	Rp 150.000.000	APBD	20	Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000		1,2						
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan			88,30%	Persen					Rp 1.450.000.000		94,20%	Persen	Rp 400.000.000								
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Database Penerima Manfaat	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			1	Database	1	Dokumen	250.000.000.00	APBD	1	Database	Rp 100.000.000		4,5						
3.29.06.1.06.02	Pengumpulan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan			Jumlah Database jaringan ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			1	Database	1	Dokumen	250.000.000.00	APBD					4,5						
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			45	Kegiatan Koordinasi	1	Laporan	300.000.000.00	APBD	45	Kegiatan Koordinasi	Rp 300.000.000		4,5						
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang terbangun	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			200	Bantuan Pasang Baru Listrik	200	Bantuan Pasang Baru Listrik	650.000.000.00	APBD	1.882	Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 5.269.600.000		4,5						
TOTAL																Rp 61.763.548.571					Rp 29.805.514.000			

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renja 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang oleh partisipasi berbagai komponen masyarakat dan sikap mental penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .

Renja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua *stakeholder*. Renstra diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang minerba, kelistrikan dan geologi air tanah.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat di implementasikan secara berkesinambungan.

Rencana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 yang saat ini sementara dalam tahap penyusunan, rencana kerja memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini merupakan rangkaian rencana kegiatan prioritas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya lain yang dimiliki Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral maupun di lingkup daerah.

Semoga Rancangan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang sekaligus akan mendukung perwujudan visi Kepala daerah periode 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”***.

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Kalimantan Utara

